

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN PADA MASA
PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN GOWA**

Oleh :

Muh Jufri

Nomor Stanbuk : 105641118916



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN PADA MASA
PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh
MUH JUFRI

Nomor Stambuk : 105641118916

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

02/09/2022

Ang. Alumni

R/0098/IPM/2208
JUF

i

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa
Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Muh Jufri

NIM : 105641118916

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,

Pembimbing I

Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Pembimbing II

Hardianto Haying, S.T., M.A

Mengetahui

Dekan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Ketua Prodi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0081/FSP/A.5-II/V/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 16 Juli 2022.



1. Dr. Amir Muhiddin, M. Si (Ketua)
2. Rudi hardi, S.Sos, M.Si
3. Hardianto Hawing, S. T., M.A
4. Muh. Randhy Akbar, M.Si

ABSTRAK

MUH JUFRI, Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Ahmad Taufik dan Hardianto hawing)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa. 2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jadi peneliti akan terjun langsung kelapangan dan melakukan penelitian dengan cara pengamatan dan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis dengan teknik deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Implementasi kebijakan sistem pendidikan di masa pandemi di Kabupaten Gowa sudah termasuk dalam kategori baik dimana sistem pembelajaran dilakukan dengan dua cara yaitu sistem pembelajaran daring dan luring. 2. Hal-hal yang mendorong atau mendukung sistem pembelajaran pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa dengan adanya surat edaran Pemerintah dalam melaksanakan sistem pembelajaran pada masa pandemi covid 19. Adapun faktor penghambat dalam sistem pembelajaran pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa ialah kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi pada masa sistem pembelajaran dalam jaringan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pandemi Covid 19

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menemani penulis selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tercinta terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tua penulis, orang tua yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan baik moril maupun materi, kepercayaan, kesabaran, serta senantiasa mengalunkan doa dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis. Doa dan dedikasi yang selalu diberikan kepada penulis dan menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studinya.

Selain itu skripsi ini selesai juga berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada.

- 1) Terima kasih kepada Kedua Orang tua dan Saudara saya yang senantiasa mendoakan, penulis memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil.
- 2) Bapak selaku pembimbing I Ahmad Taufik, S.IP., M.AP dan Bapak Hardianto Hawing, S.T., MA selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 3) Ibunda Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4) Bunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 5) Para Bapak dan Ibu Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini memberikan ilmunya kepada penulis serta dorongan dan semangat yang selalu diberikan.
- 6) Para Sahabat penulis yang selalu menemani terkhusus anak-anak Kampus 2 yang selalu memberi semangat dan bantuan.
- 7) Semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Jufri

Nomor Stambuk : 10564 1118916

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 04 November 2021

Yang Menyatakan,

Muh Jufri

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka Pikir.....27



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3.1 Infoman Penelitian.....	34



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK.....	iii
PENERIMAAN TIM.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	13
C. Sistem Pendidikan Nasional.....	22
D. Kerangka Pikir.....	26
E. Fokus Penelitian.....	27
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

A. Waktu dan Lokasi.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Jenis Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data.....	32
G. Pengabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian.....	38
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
LAMPIRAN.....	55
DAFTAR PUSAKA.....	56

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam proses pelaksanaannya, hal tersebut terjadi karena dampak dari COVID-19 yang menyebabkan aspek kehidupan berubah dan mengharuskan penyesuaian dengan cepat, salah satunya dalam dunia pendidikan. Melihat fenomena sosial yang tidak dikehendaki tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 (Covid-19) tentang penerapan kebijakan pendidikan darurat terhadap penyebaran infeksi virus corona. Surat edaran tersebut menjelaskan enam langkah strategis untuk melaksanakan kebijakan pendidikan diantaranya ujian nasional, proses belajar di rumah, ujian sekolah, Kenaikan kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru dan Dana Bantuan Operasional (Jojo & Sihotang, 2022).

Salah satu langkah strategis yang dijelaskan dalam surat edaran Nomor 4 mengenai Proses Belajar Dari Rumah dilakukan dengan mempertimbangkan psikologis peserta didik dalam memberikan pembelajaran yang bermakna dan disesuaikan dengan akses atau fasilitas setiap peserta didik. Hal tersebut dipertegas kembali, dalam (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pedoman pelaksanaan belajar di rumah selama keadaan darurat wabah Covid-19, memastikan pengayaan siswa untuk layanan pendidikan darurat Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, wabah dan

infeksi Covid-19 di dunia pendidikan serta memberikan dukungan psikososial bagi pendidik, siswa dan orang tua / wali. Hal tersebut sejalan dengan berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 (Jojo & Sihotang, 2022).

Perubahan-perubahan kasat mata yang terjadi akibat Covid-19 terlihat di berbagai aspek kehidupan; perilaku individu, respon komunitas; penyelenggaraan bisnis dan ekonomi, tata kelola negara, dan relasi global. Perubahan yang berlangsung dan mengarah ke new normal ini merupakan implikasi dari pengaturan selama masa tanggap darurat Covid-19 seperti diberlakukan lockdown dan isolasi, level komunitas, social distancing, mekanisme work from home, distance learning, efisiensi, dan refocusing sumber daya, serta penyesuaian lainnya yang kemudian menjadi kebiasaan baru. Di tingkat global, salah satu perubahan mendasar ditandai dengan menguatnya berbagai bentuk restriksi yang dilakukan banyak negara, baik menyangkut pergerakan manusia dan barang.

implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Grindle dalam (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan yang telah

ditentukan dalam kerangka keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu yang tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk mencapai perubahan-perubahan kecil dan besar yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 2007).

Sistem Pendidikan di Kabupaten Gowa pada masa pandemi covid 19 yang menerapkan sistem pembelajaran dalam jaringan sesuai dengan surat edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat Penyebaran *Corona Virus Diseases-19*.

Permasalahan diatas yang dihadapi tentang Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa adalah, kurangnya sarana dan prasana dalam penunjang pendidikan itu disebabkan karena minimnya akses jaringan di pelosok-pelosok di Kabupaten Gowa atau daerah yang jauh dari kota sehingga peserta didik tingkat Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama banyak yang kurang efektif dalam proses pembelajaran dalam jaringan yang akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran tersebut dan banyak peserta didik pula yang menurun nilai pelajaran karena tidak sering mengikuti pembelajaran dalam jaringan.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Di atas Maka Peneliti Tertarik Untuk Mengangkat Penelitian Dengan Judul **Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana Implementasi kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa?
- 2) Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Implementasi Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pembuatan skripsi penelitian ini ialah antara lain:

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Implementasi Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk menghasilkan konsep dalam implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa.

- 2) Manfaat Praktis

Di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan dinas pendidikan di Kabupaten Gowa, dalam implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa. Hasil

penelitian ini di harapkan dapat menjadi nilai tambah yang selanjutnya dapat di kombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya khususnya Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.1

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Viridi 2006)	Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi Akademik Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Organisasi dan segala upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi akan berakhir atau didedikasikan untuk klien atau konsumennya, terutama yang utama yaitu mahasiswa. Upaya pengelolaan, belajar mengajar, penelitian atau CSR (Community Service Responden) atau yang lebih di kenal dengan pengabdian kepada masyarakat, akan bermuara pada bagaimana melayani pengguna jasa utamanya, yaitu mahasiswa. Prestasi akademik merupakan salah satu indikator kinerja perguruan tinggi selain tercapainya tiga misi utama perguruan tinggi yaitu Tri Dharma Pendidikan yang meliputi misi

			pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kinerja Universitas ini menjadi acuan utama dalam proses pengelolaan kelembagaan.
2.	(Arind a. 2014)	Efektivas Penerapan D BISO	Penelitian ini terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pelayan di bidang pendidikan ternyata bukanlah kebijakan (Bayuwangi Digital Society) yang tepat. Hal ini terlihat dari penerapan Sistem Informasi Pendidikan Online di Kabupaten Bayuwangi yang belum mencapai titik optimal. Selain itu, kebijakn sistem informasi aplikasi pendidikan online di Kabupaten Bayuwangi yang (studi pada belum mencapai titik optimal. Selain itu, Dinas kebijakan apliakasi sistem informasi pendidikan aplikasi pendidikan online ini terkesan membuang-buang uang karena aplikasi yang di gunakan hanya untuk PPDB online yang hanya bertahan selama tiga hari pemakain. Pengisian data akademik dan pelaporan keuangan belum di lakukan

		secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa kebijakan penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online hanya diterapkan untuk mendukung program dari Bupati Bayuwangi yaitu B-DISO (Masyarakat Digital Banyuwangi) sehingga Dinas Pendidikan pada hakekatnya hanya mengikuti arahan dari pemimpin.
3.	(Prabowo et al., 2014)	Implementasi Keterbukaan UU Informasi dan DPKKD, Dinas Pendidikan Publik Dalam merupakan SKPD yang paling siap Upaya melaksanakan UU KIP dan peraturan Mewujudkan turunanya dengan membentuk suatu Good struktur PPID. Sedangkan untuk Bappeda Governance dan DPKAD dari hasil wawancara dan (kajian tiga observasi di temukan bahwa stuktur PPID badan publik) belum terbentuk sebagaimana diatur dalam Bappeda, Perwal No.26 Tahun 2012 yang DPKAD dan disebabkan oleh beberapa kendala. DI dinas DPKAD salah satu dari dalam lampiran

		pendidikan Kota Semarang,	peraturan Walikota Semarang No.26 tahun 2012 masalah karena jabatan sekretaris DPKAD yang diangkat sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sebagaimana di atur dalam kepwal No.821.29/265 mengalami kekosongan karena pejabat sebelumnya pensiun sehingga diisi oleh Aktor yang tidak memahami peraturan. Kendala lain yang di hadapi oleh Bappeda dan DPKAD seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman pejabat terkait regulasi keterbukaan dan sosialisasi informasi publik yang kurang efektif di mana pembahasannya tidak mendalam, terutama terkait operasionalisasi regulasi seperti yang di sampaikan oleh sekretaris Bappeda.
--	--	---------------------------	---

Hasil dari ketiga penelitian tersebut, hampir sama dengan penelitian yang akan saya lakukan, bedanya penelitian yang saya akan lakukan yakni lebih berfokus pada Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 Kabupaten Gowa.

B. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi

Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris, yang mana bentuk kata awalnya adalah *Implementation* yang bentuk kata kerjanya adalah *to implement* dimaksudkan sebagai *to carry into effect* (Membawa suatu hasil atau akibat). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Erwan Agus Purwanto menjelaskan juga bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Surbakti et al., 2021).

Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk

memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Surbakti et al., 2021).

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu:

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan.
- 2) Adanya unsur pelaksana (implementor) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Agusti, 2020) berpendapat bahwa Implementasi merupakan pemahaman yang akan terjadi setelah ditetapkannya suatu program yang menjadi fokus dari perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian *output* dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.

Pressman dan Wildavsky dalam (Tangkilisan, 2003). implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Sedangkan menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood dalam (Naibaho, 2018), hal-hal yang berhubungan dengan.

Implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha – usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kepada tujuan kebijakan yang diinginkan.

Kata Implementasi merupakan kata serapan dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris, yang mana bentuk kata awalnya adalah *implementation* yang bentuk kata kerjanya adalah *to implement* dimaksudkan sebagai *to carry into effect* (membawa suatu hasil atau akibat). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan instansi pelaksana kesedian. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu:

- a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan.
- b) Adanya unsur pelaksana (implementor) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

2. Kebijakan Publik

Banyak definisi mengenai kebijakan publik, kebanyakan ahli memberi penekanan pada pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik (*good impact*) bagi warga negaranya Bridgeman dalam (Fuwu, 2020).

mengatakan bahwa kebijakan publik mengandung arti: "*whatever government choose to do or not to do*". Artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin public (*public leaders*) harus mampu membuat

kebijakan untuk mencapai "*common good*". Namun ironisnya dalam situasi krisis, tidak semua pemimpin publik bisa menunjukkan kepemimpinan yang memadai, yang berakibat pada tergerusnya legitimasi kepemimpinan, bahkan bisa menyebabkan krisis kepercayaan terhadap system Farazmand dalam (Tuwu, 2020).

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparaturnya Negara, tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik Suharto dalam (Tuwu, 2020).

Kebijakan berasal murni dari pertimbangan akal manusia, sekalipun demikian tentu manusia yang lebih dominan dalam pemilihan opsi-opsi kebijakan, karena dalam pemutuserannya terdapat penekanan kebijaksanaan dari faktor emosional dan irasional, bukan berarti kebijakan tidak rasional akan tetapi mungkin saja kebijakan saat itu rasional belum tercapai atau merupakan intuisi Tilaar dan Nugroho dalam (Tuwu, 2020).

Dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang kompeten, tentunya perlu merujuk pada proses pembuatan kebijakan dan formulasinya. Dalam melakukan formulasi kebijakan harus memperhatikan hal-hal yang bersifat urgen dan paling mendesak karena ketika kepala sekolah memilih untuk

mengambil sebuah kebijakan tentunya berdasarkan analisis pelaksanaan atau perencanaan dan juga isu yang berkembang di lapangan Irwan Abdu Nugraha dalam (Budiyanti et al., 2021).

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah publik atau kepentingan masyarakat luas, dan kebijakan publik umumnya dikeluarkan oleh Pemerintah. Kebijakan publik atau public Policy dapat pula disebagai adanya sebab akibat, sebagaimana dikemukakan dengan menyatakan: "Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, kinerja kebijakan dan program publik" Syafie dalam (Fatimah, 2020).

Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi Sholih Muadi dalam (Budiyanti et al., 2021).

Idealnya proses perumusan kebijakan berkaitan erat dengan proses kerja ilmiah yang meliputi 1) identifikasi dan formulasi masalah kebijakan, 2) penentuan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah 3) pengkajian atau analisis kelayakan masing-masing alternatif kebijakan, 4) pelaksanaan kebijakan dan menentukan standar kinerja minimal, 5) evaluasi keberhasilan, dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti costbenefit analysis, cost-effectiveness analysis dan lain-lain. Menyusun masalah kebijakan terdiri dari

tiga langkah, yaitu: mengartikan, mengkonsep dan mengkhususkan masalah Munawar Sholeh dalam (Budiyanthi et al., 2021).

3. Implementasi Kebijakan

Studi mengenai implementasi kebijakan merupakan suatu studi kebijakan publik yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Pada tataran praktik, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu rumit bahkan tidak jarang bermuatan kepentingan politik dengan adanya intervensi aktor-aktor politik. Implementasi sebagai "to provide the means for carrying out (menyediakan sarana melaksanakan sesuatu); to give practical effects to (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)" Wahab dalam (Hidayat, 2020). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu Hasman dalam (Hidayat, 2020).

Meter dan Horn dalam (Suaib, 2016) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu (kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut (Winarno, 2007) merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam kerangka keputusan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu

yang tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk mencapai perubahan-perubahan kecil dan besar yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (Aziz, 2013) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

Dari beberapa definisi para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan yang dilaksanakan oleh agen pelaksana atau pejabat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang hendak di capai.

Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* Andrew Dunsire dalam (Humaizi, 2013). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut Walter Williams dalam (Humaizi, 2013).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a) *Non implementation* (tidak terimplementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan

kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulasi.

b) *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- 1) Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
- 2) Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
- 3) Kebijakan itu sendiri bemasib jelek (*bad luck*)
- 4) Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasinya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ripley dan Franklin mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu (Priyatin & Rahmi, 2022)

- 1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan, maka perlu adanya kepatuhan dari birokrasi

terhadap birokrasi di atasnya. Hal tersebut bertujuan agar Implementor dapat menjalankan kebijakannya dengan baik dan benar. Diharapkan dengan adanya kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi yang di atasnya, maka implementor akan tanggap terhadap apa yang harus dilakukan, dan melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan.

2) Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Dengan adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah dalam pemberian insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah, maka kebijakan akan berjalan dengan lancar dan seharusnya. Diharapkan perusahaan dapat mengerti tata cara mendapatkan insentif PPh 21 untuk karyawan.

3) Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Pelaksanaan dan dampak (Manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang terarah dapat membuat kebijakan menjadi terlaksana. Hal tersebut dapat menciptakan sebuah keberlanjutan agar dapat berjalannya penerapan ini sesuai dengan tujuan.

4. Model Implementasi Kebijakan

Dalam kajian administrasi public Waldo dalam (Suaib, 2016) mengemukakan banyak model merupakan saran untuk meredusir semua konsepsi terkait realitas atau universal dan sifat, yang berfungsi untuk menyederhanakan pemahaman tentang sesuatu atau menggunakan analogi, di mana peng konsepsian sesuatu yang belum di ketahui didasarkan pada sesuatu yang sudah kita ketahui, serta dengan menggunakan metafora untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena.

Adapun model-model implementasi kebijakan dalam perkembangannya (Suaib, 2016). Antara lain yaitu:

a. Model Van Mater dan Van Horn

Model ini di sebut *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Argument yang diberikan merupakan suatu perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi kebijakan akan di pengaruhi oleh sifat kebijakan. Pendekatan ini berusaha menghubungkan antara implementasi dengan isu kebijakan dan suatu model konseptual yang memperhatikan kebijakan dengan prestasi kerja. Kepatuhan, control dan perubahan bertindak adalah merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementasi.

Implementasi kebijakan dapat berhasil apabila modifikasi yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari orng-orang yang menjalankan program di lapangan relative tinggi (Suaib, 2016).

b. Model George C. Edward III

Menurut teori implementasi kebijakan (Edward III george C, 1984) ada 4 variabel atau tahapan yang sangat menentukan kesuksesan implementasi kebijakan, yaitu antara lain:

1) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu

kebijakan/program. Komunikasi berkaitan dengan proses kebingungan pada pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara konsisten dan jelas, akan tetapi *implementor* atau pelaksana kekurangan sumber daya untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program agar efektif, yakni tanpa adanya sumber daya maka program atau kebijakan hanya sebatas kertas dokumen. mengemukakan bahwa hal ini terdapat 4 (empat) komponen, yaitu:

- a) Staf. Staf merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang seiring dialami dalam pelaksanaan kebijakan biasanya disebabkan oleh staf yang tidak memadai, mencukupi, atau pun tidak kompeten di di bidangnya.
- b) Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki 2 bentuk, yakni pertama informasi yang berhubungan dengan cara mengimplementasikan kebijakan. Kedua, informasi terkait data kepatuhan dari para *implementor* terhadap regulasi dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang, pada dasarnya kewenangan harus bersifat formal supaya dapat dilaksanakan. Kewenangan adalah legitimasi atau

otoritas bagi para *implementor* dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik.

d) Fasilitas, adalah suatu faktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang memadai, mengerti apa yang harus dilakukannya, namun tanpa adanya fasilitas pendukung maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa berhasil.

3) Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparat birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam variable disposisi adalah sebagai berikut:

a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan kendala-kendala yang nyata terhadap mengimplementasikan kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi.

b) Insentif, Edward mengemukakan bahwa teknik yang disarankan untuk memberantas masalah kecenderungan para pelaksana

merupakan dengan memanipulasi insentif. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang bertindak menurut kepentingan diri sendiri, oleh karena itu memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memberi pengaruh terhadap tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah biaya atau keuntungan tertentu membuat para *implementor* kebijakan melaksanakan perintah dengan baik

4) Struktur Birokrasi

Menurut (Edward III George C, 1984) terdapat 2 karakteristik yang dapat membongkar kinerja struktur birokrasi untuk menuju ke arah yang lebih baik diantaranya: pelaksanaan fragmentasi dan melakukan *Standar Operating Procedure* (SOP). SOP adalah suatu aktivitas rutin yang memungkinkan para pegawai (atau birokrat/administrator pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pegawai di antara beberapa unit kerja.

Berdasarkan pemaparan model-model implementasi tersebut, peneliti mengambil model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh (Edward III George C, 1984) dikarenakan variable-variabel Edward melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta ataupun publik secara individual maupun kelompok. Di mana implementasi kebijakan ini

meliputi 3 unsur yaitu langkah yang diambil oleh badan atau lembaga administratif, tindakan yang menggambarkan ketaatan kelompok target, dan jejaring sosial politik serta ekonomi yang mempengaruhi para *stakeholder* tersebut. Interaksi ke3 unsur tersebut pada akhirnya akan melahirkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sehingga dapat membantu permasalahan-permasalahan yang terkait implementasi kebijakan sistem

C. Sistem Pendidikan Era Covid 19

Mempertimbangkan situasi peningkatan kasus penularan Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, diperlukan diskresi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor OS/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/16678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 (selanjutnya disebut Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri),

Adapun sistem pembelajaran pada masa pandemi covid 19

1) Sistem Konvensional Dalam Proses Belajar Mengajar

Sebenarnya yang menjadi masalah inti di dalam dunia pendidikan, yang dapat ditemukan sebagai kekurangan adalah proses belajar mengajar

konvensional yang mengandalkan tatap muka antara guru dan siswa, dosen dengan siswa, pelatih dengan peserta pelatihan, namun ini adalah target yang mudah dan paling mudah menjadi target yang menginginkan peningkatan kualitas di dunia pendidikan.

Sistem konvensional dapat dikatakan menjadi tidak efektif jika dalam proses belajar mengajar sama sekali menggunakan sistem konvensional ini, karena seiring dengan perkembangan zaman, pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan lebih tepat, tetapi lembaga yang masih menggunakan sistem pengajaran tradisional ini (di tingkat sekolah menengah mempertimbangkan untuk memberikan informasi) sangat lambat dan tidak sejalan dengan perkembangan IT (Pujilestari, 2020)

2. Pemanfaatan Kemajuan IT guna Mendukung Proses Belajar Mengajar

Sistem konvensional ini semestinya dipadukan dengan media komunikasi multimedia, khususnya sejak ditemukannya media komunikasi multimedia ini. Karena sifat internet yang dapat dihubungi kapan saja, itu berarti siswa dapat memanfaatkan program pendidikan yang disediakan di internet kapan saja sesuai dengan waktu luang mereka, sehingga ruang dan kendala waktu yang mereka hadapi dalam menemukan sumber belajar dapat diatasi. Dengan perkembangan pesat di bidang telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi, mendengarkan ceramah, membuat catatan di atas kertas tentu sudah ketinggalan zaman.

Setiap sistem sekolah harus moderat dengan teknologi yang memungkinkan mereka belajar lebih cepat, lebih baik, dan lebih pintar. Dan

Teknologi Informasi adalah kunci untuk model sekolah masa depan yang lebih baik. Namun upaya anak-anak bangsa juga terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam hal menyampaikan proses pendidikan dengan menggunakan IT. Sebagai contoh, Telkom, Indosat, menyatakan kesiapan mereka untuk mengembangkan IT untuk pendidikan di Indonesia, dimulai dengan proyek percontohan. Telkom menyatakan akan terus meningkatkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi yang diharapkan menjadi tulang punggung pengembangan dan penerapan TI untuk pendidikan dan implementasi lainnya di Indonesia. Bahkan, sekarang Telkom mulai mengembangkan teknologi yang memanfaatkan ISDN (Integrated Services Digital Network) untuk memfasilitasi teleconference sebagai aplikasi pembelajaran jarak jauh (Pujilestari, 2020).

3. Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Pasca Pandemi Covid-19

Pasca pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia yang kemudian pertengahan Maret 2020 untuk menekan angka penderita Covid 19, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menghasilkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran online baik tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi, diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut electronic university (e-University). Pengembangan e-University bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat

menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya, baik didalam maupun diluar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Layanan pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui sarana internet yaitu dengan menyediakan materi kuliah secara online dan materi kuliah tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. (Pujilestari, 2020).

Namun prospek untuk masa depan, penggunaan IT di SMU cukup cerah, terlebih pasca pandemi covid 19 yang juga memberlakukan setiap sekolah melakukan pembelajaran online seperti contoh Kemdikbud memiliki portal media pembelajaran online bernama Rumah Belajar yaitu <https://belajar.kemdikbud.go.id/Dashboard/>, kemudian ada juga pembelajaran yang dapat dilakukan guru dan murid yaitu ruang guru dengan siswa akses <https://ruangguru.com/>.

Situs ini dimaksudkan untuk pengembangan pendidikan agar pembelajaran tidak vakum dalam kondisi covid 19 saat ini, dan untuk menyajikan sumber daya publik dan jaringan komunikasi (forum) untuk administrator sekolah, pendidik, dan siswa. TI dan Internet memiliki banyak manfaat, tetapi ada beberapa kendala di Indonesia yang menyebabkan TI dan Internet tidak dapat digunakan secara optimal.

Kesiapan pemerintah Indonesia masih dipertanyakan dalam hal ini. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, proses transformasi teknologi, infrastruktur telekomunikasi dan perangkat hukumnya yang mengaturnya. - 55 - * Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020) Apakah infrastruktur hukum yang melandasi

operasional pendidikan di Indonesia cukup memadai untuk menampung perkembangan baru berupa penerapan IT untuk pendidikan ini. Selain itu masih terdapat kekurangan pada hal pengadaan infrastruktur teknologi telekomunikasi, multimedia dan informasi yang merupakan prasyarat terselenggaranya IT untuk pendidikan sementara penetrasi komputer (PC) di Indonesia masih rendah. Sementara itu tempat akses Internet dapat diperlebar jangkauannya melalui fasilitas di kampus, sekolah, dan bahkan melalui warung Internet. Hal ini tentunya dihadapkan kembali kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta; walaupun pada akhirnya terpulang juga kepada pemerintah. Sebab pemerintahlah yang dapat menciptakan iklim kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi investasi swasta di bidang pendidikan.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengembangkan kerangka berpikir dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam penelitiannya. Melalui kerangka pikir ini, jelas bahwa tujuan penelitian telah dikonseptualisasikan sebelumnya. Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa merupakan sistem pembelajaran daring dan luring. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Adapun fokus mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa yaitu dengan menggunakan model implementasi (Edward III george C, 1984), yang terdiri dari 4 variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di mana keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintang implementasi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat peran keempat faktor tersebut dalam implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi deskripsi dalam fokus penelitian tersebut:

1. Komunikasi berarti proses penyampaian informasi kepada komunikan. Yang dimaksud dengan komunikasi kebijakan ialah bagaimana proses penyampain suatu informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Transmisi (penyampaian) program dan informasi standar dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana dan pengguna kebijakan.
 - b. Kejelasan penyampaian program dan informasi tentang pelaksanaan implementasi kebijakan sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa.
2. Sumber Daya ini berkenaan dengan kesedian dari sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Adapun sumber daya yang dimaksud yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan dari kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 misalnya kepala bidang dan pengawas yang yang mensosialisasikan sistem pembelajaran secara dalam jaringan.

- b. Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk menunjang proses implementasi mengenai kebijakan sistem pendidikan.
3. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implemntor untuk mengeksekusi kebijakan, terkait dengan pembagian tugas pokok dan fungsi. Disposisi pelaksana meliputi:
- a. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap implemntasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa
 - b. Sikap pelaksana terhadap implemntasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa
4. Struktur birokrasi mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Seperti halnya Dinas Pendidikan kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki sejumlah personil. Setiap personil diatur penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi. Pada setiap jenjang memiliki peran yang harus dimainkan sesuai tugasnya masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama dua bulan 12 Pebruari 2022 – 12 Maret 2020. Penelitian ini menetapkan tempat penelitian pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Pertimbangan dalam memilih lokasi tersebut karna data ataupun dokumen sesuai dengan Implementasi Kebijakan Sistem pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif berkaitan dengan objek penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Sistem Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa.

C. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data terdiri dari:

- 1) Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan;
- 2) Data sekunder, yaitu data pendukung data yang diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Dokumen mengenai kota dan karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti dan di dapat dari institusi lembaga yang bersangkutan.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini di dapat oleh Kepala Bidang, Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Orang Tua Peserta Didik di kabupaten gowa.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Dr. Ulfa Tenri Batari	Kepala Bidang Sekolah Dasar	1 Orang
2	Muh Usman S. Stp	Satuan Pendidikan	1 Orang
3	Arfa	Orang Tua Peserta Didik	1 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi merupakan Mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian di Kabupaten Gowa;
- 2) Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau berdialog dengan informan yang memiliki kapabilitas (kemampuan) seperti kepala Dinas Pendidikan, Ketua Bidang dan serta masyarakat yang ada;
- 3) Telaah Dokumen merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
- 4) Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah wawancara dan telaah dokumen. Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data

tambahan melalui jurnal, buku, website, foto-foto dan hal yang berhubungan dengan variable yang diteliti.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan, sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Proses analisis data dilakukan bertahap sebagai berikut:

- 1) Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia;
- 2) Hasil wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan catatan lapangan;
- 3) Mereduksi data dengan cara membuat rangkuman (inti dan proses pernyataan dan informasi);
- 4) Penyajian Data, Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengordinasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari objek penelitian.

Penarikan Simpulan, Simpulan dapat berupa kegiatan yang berupa pengembangan ketelitian dalam suatu data. Penarikan simpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relevan.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan metode triangulasi. Menurut Sugiyono dalam (Budiyantri et al., 2021) teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggaungkan dari

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi, yaitu

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, 42 Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jenepono sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40

derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu.

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

2. Penduduk Kabupaten Gowa

Penduduk Kabupaten Gowa tercatat sejumlah 691.309 jiwa yang terdiri dari 339.575 laki-laki dan 351.734 perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Gowa yaitu sekitar 97%. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Sebaran penduduk Kabupaten Gowa menurut Kecamatan menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Sombaopu sebanyak 137.942 jiwa, disusul Kecamatan Pallangga sebanyak 104.523 jiwa dan Kecamatan Bajeng sebanyak 65.997 jiwa. Kecamatan Parigi sebagai wilayah dengan penduduk terendah, dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 13.859 jiwa.

3. Visi dan Misi Kabupaten Gowa

Memperhatikan visi dan misi pemerintah Kabupaten Gowa yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa periode 2016-2021. Adapun visi Kabupaten Gowa yaitu "Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

Misi tersebut kemudian dirumuskan dalam misi sebagai upaya untuk mencapai visi, diantaranya, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama
 - b) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan
 - c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor
 - d) Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
 - e) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.
4. Profil singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
- a. Visi

Terseleenggaranya layanan pendidikan yang prima untuk membentuk manusia yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Gowa sebagai Kabupaten Pendidikan.
 - b. Misi
 1. Menyediakan Layanan Pendidikan yang Merata dan Terjangkau
 2. Meningkatkan Profesionalitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
 3. Menyediakan layanan Kepemudaan yang merata
 4. Menyediakan layanan cabang olahraga yang merata
 5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.
 - c. Program Unggulan:
 1. Pendidikan gratis

2. Sistem kelas tuntas berkelanjutan
3. Pembangunan manusia seperempat abad
4. Imtaq Indonesia
5. Gowa Kabupaten pendidikan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seseorang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, suatu kebijakan tentunya haruslah berpihak kepada seluruh elemen, khususnya masyarakat.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan. Selanjutnya untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan tersebut pemerintah pusat tentunya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar diketahui peran dari implementor tingkat Kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Guna memperlancar penerapan dari kebijakan tersebut, maka seluruh pihak yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan harus mampu menjalankan keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab akan implementasiannya.

kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid 19 merupakan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan

tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa. Sama halnya di katakan oleh DR. Ulfa Tenri Batari selaku kepala bidang Sekolah Dasar.

"Bentuk kebijakan Dinas Pendidikan terkhusus di tingkat bidang Sekolah Dasar dalam pembelajaran pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa dilakukan dengan dua cara yaitu, pembelajaran dalam jaringan dan pembelajaran luar jaringan melalui Blended Learning". (Hasil wawancara 23 Maret 2022)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa menggunakan 2 cara sistem pembelajaran, sistem pembelajaran dalam jaringan di lakukan di wilayah tertentu yang memiliki akses jaringan yang baik sedangkan sistem pembelajaran di luar jaringan dilakukan di daerah dataran tinggi yang minim akses jaringan dilakukan dengan bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas. Begitu pula jumlah hari dan jam belajar menjadi dikurangi, dengan sistem pergiliran rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Pada pengimplementasian kebijakan Pemerintah tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Menerbitkan petunjuk teknis dalam sistem pembelajaran dalam jaringan di tingkat Sekolah Dasar seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

"Implementasi pembelajaran dalam jaringan sesuai dengan surat edaran dari Kemendikbud, Yaitu media yang digunakan melalui gawai dan fasilitas diskusi dilakukan di group media sosial maupun aplikasi pesan yaitu di grup aplikasi whatsapp yang telah di buat oleh wali kelas masing-masing setiap tingkatan. Penggunaan aplikasi

whatsapp sebagai media interaksi selama pembelajaran dalam jaringan lebih mudah digunakan, mudah diakses semua siswa dan orang tua memiliki aplikasi tersebut. Dibandingkan aplikasi LMS seperti google classroom, ruang guru dan sebagainya". (Hasil wawancara 05 April 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pembelajaran dalam jaringan yang diterapkan oleh kepala sekolah di jenjang Sekolah Dasar ditopang oleh media sosial yang sangat membantu dalam menyampaikan materi di masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa. pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa tenaga didik dan peserta didik dilarang berinteraksi atau bersentuhan secara langsung demi keselamatan bersama. Beda halnya dilakukan dengan sistem pembelajaran luar jaringan seperti yang dikatakan oleh salah satu kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

"Berdasarkan surat edaran kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Pelaksanaan pembelajaran luar jaringan yaitu pertama, guru memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, dilarang memaksakan penuntasan kurikulum. Kedua, menyiapkan materi pembelajaran. Dan Ketiga, menentukan metode dan media pembelajaran. Sebelum pelaksanaan pembelajaran luar jaringan setiap guru menyusun rencana program pembelajaran dahulu. Perencanaan tersebut guna memperlancar selama pelaksanaan pembelajaran luar jaringan. Untuk pemberitahuan media dan sumber pembelajaran luring diberitahukan melalui pesan di grup whatsapp. Penggunaan media dan sumber pembelajaran disesuaikan intruksi dari guru pengajar. Pemberitahuan penggunaan media dan sumber dari radio dan TV juga dicantumkan chanel akun youtube penyiaran tersebut agar bisa di pelajari kapanpun. Tugas yang diberikan dibolehkan dikumpulkan atau dikirim kapanpun sebelum jatuh tempo tanggal selesai penugasan. Jika siswa dan orang tua kurang paham atas pembelajaran yang disampaikan bisa konsultasi melalui group maupun chat pribadi guru yang menyampaikannya". (Hasil wawancara 05 April 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pembelajaran luar jaringan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa salah satu sebagai pembelajaran yang terbaru tidak seperti biasanya sebelum terjadinya pandemi covid 19, sistem pembelajaran luar jaringan pada masa pandemi covid 19 yang diterapkan ini dengan sistem pembelajaran 30-50 persen peserta didik yang mengikuti mata pelajaran dengan 3 jam perhari, pershift dan 3 kali dalam satu minggu, sistem ini digunakan guna mencegah penularan covid 19 di Kabupaten Gowa dan mematuhi surat edaran dari kemendikbud.

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan sangat perlu untuk disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi suatu program masyarakat agar *implementor* dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan satuan Pendidikan Kabupaten Gowa mengetahui apa saja yang harus dilakukan, di mana hal tersebut menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada target grup (kelompok sasaran) sehingga ada kejelasan mengenai kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa.

Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa adalah Sebagai Berikut:

a) Transmisi

Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terlibat. Terkait dengan penyampaian informasi mengenai Sistem pendidikan dalam jaringan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa dan satuan pendidikan dalam hal ini telah melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, peserta didik dan tenaga didik. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yaitu dengan penyampaian informasi yang jelas melalui media sosial berupa *via zoom, E. Learning*. DR. Ulfa Tenri Batari selaku kepala bidang Sekolah Dasar.

"Iya, kami adakan sosialisasi kepada seluruh stakeholders Pendidikan, mulai dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua siswa, komite siswa sampai kepada peserta didik lewat Zoom Meeting supaya sistem pembelajaran daring dan luring pada masa pandemi covid 19 tidak simpang siur" (Hasil wawancara 23 Maret 2022).

Dari hasil wawancara kepala bidang diatas, beliau menerapkan sistem pembelajaran daring pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa. Sistem pembelajaran dalam jaringan ini sangat efektif dan efisien. Selain mematuhi proktokol kesehatan dari pemerintah, peserta didik dan tenaga didik dapat beraktivitas seperti belajar mengajar lewat zoom meeting. Kepala Bidang Sekolah Dasar mengharapkan agar orang tua peserta didik turut membantu mengawasi anak-anak pada saat pembelajaran daring sedang berlangsung.

Selain itu Kepala Bidang Sekolah Dasar menerapkan pula sistem pembelajaran Luring dimana diperuntuhkan kepada peserta didik yang

tidak memiliki akses jaringan yang tidak memadai, seperti peserta didik yang tinggal dipelosok Desa.

b) Kejelasan Informasi

Dimensi kejelasan informasi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak membingungkan pelaksana program, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 ini sudah jelas, bahwa tujuan pembelajaran dalam jaringan adalah memudahkan komunikasi penyampain materi ajar dalam bidang pendidikan yang dilakukan jarak jauh. Tujuan pembelajaran daring pada umumnya diperuntukkan untuk metode pelajaran yang tidak tatap muka. Sebagaimana wawancara yang dikatakan oleh Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Pak Usman:

"Kebijakan ini dikeluarkan akan sangat memudahkan tenaga didik mengadakan adanya penilaian meski pembelajaran jarak jauh. Tujuan pembelajaran dalam jaringan pun akan sangat memudahkan kegiatan belajar yang membuat peserta didik lebih mandiri. (Hasil wawancara U 27 maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem pendidikan dalam jaringan ini dirumuskan memudahkan proses belajar mengajar pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa. akan tetapi tidak semua masyarakat Kabupaten Gowa mengetahui kebijakan ini, Sebagaimana wawancara yang dikatakan oleh salah satu orang tua peserta didik:

"Saya tidak mengetahui sistem pembelajaran dalam Jaringan saya hanya ditanya oleh anak-anak bahwa sistem pembelajaran saat di masa pandemi covid 19 yang paling efektif yaitu dengan menggunakan sistem online yang sering dikenal dalam Jaringan. Setahu saya sistem pembelajaran itu anak-anak datang ke sekolah (hasil wawancara M. 25 maret 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak semua masyarakat mengerti dan mengetahui kebijakan sistem pendidikan tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk kejelasan informasi belum maksimal dimana mengenai kebijakan sistem pendidikan ini hanya diketahui oleh agen pelaksana sedangkan masyarakat masih sebagian yang tidak mengetahuinya. Dimana seharusnya pihak satuan pendidikan harus memberikan kejelasan informasi untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan suatu tujuan.

2. Sumber Daya

Sumber daya ini berkenaan dengan kesediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dimensi sumber daya menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan suatu program, karena sumber daya adalah penggerak utama dalam suatu program. Apabila sumber daya tidak mencukupi maka pelaksanaannya akan terhambat dan tidak bisa berjalan dengan harapan yang diinginkan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19

a. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses implementasi. Apabila sumber daya manusia dalam sebuah organisasi tidak siap, maka kegiatan organisasi tidak akan berjalan secara optimal. Di sisi lain, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasian kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak menukupi, memadai, serta tidak kompeten didalamnya. Namun staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staff harus mempunyai keterampilan dan kompeten dibidangnya masing-masing. Terkait dengan sumber daya yang ada dalam kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa ini terdapat kesediaan sumber daya manusia yang siap menjalankan roda sistem pembelajaran daring, seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu DR. Ulfa Tenri Batari selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar.

"Dalam pelaksanaan sistem pembelajaran daring pada masa pandemi covid 19 kepala bidang Sekolah Dasar sudah siap tempur dimana secara khusus menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet" (hasil wawancara RM. 24 Maret 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem pendidikan Kepala Bidang Sekolah Dasar Kabupaten Gowa sudah siap dalam menjalankan pembelajaran daring, dibantu dengan sumber daya manusia yang sudah paham. Dari sisi pandemi tersebut kita bisa melihat peluang pendidikan di masa depan yang terbentuk

dari kondisi pandemi covid 19, menurut penulis pembelajaran daring bisa tetap diterapkan setelah pandemi berlalu.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor atau pelaksana kebijakan setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan tersebut maka implementor akan melakukan dan melaksanakannya dengan senang hati namun apabila pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para implementor terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni kognisi (pemahaman) serta sikap implementor.

a) Kognisi

Kognisi merupakan pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa. Namun walaupun sudah dinilai cukup baik dalam melaksanakan kebijakan sistem pendidikan namun masih perlu adanya upaya guna memberikan pemahaman seluruhnya dari implementasi kebijakan sistem pendidikan. Berikut yang dikatakan oleh Ibu Dr. Ulfa

Tenri Batari selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar.

“Iya, Kepala Bidang Sekolah Dasar mulai memahami dan mengerti kebijakan yang bisa diterapkan pada masa pandemi covid 19 yaitu sistem pembelajaran dalam jaringan”. (Hasil wawancara UTB 23 maret 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa di tingkat Sekolah Dasar sudah memahami dengan tugas pokok masing-masing.

b) Sikap Pelaksana

Kecenderungan perilaku atau karakteristik pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana komitmen, komitmen akan mengarahkan pelaksana untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan dan juga terwujudnya profesionalitas. Kemudian komitmen juga akan membuat pelaksana kebijakan selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah komitmen baik dari Dinas Pendidikan dan kepala bidang dalam mengimplementasikan Kebijakan Sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19. Komitmen sangat di butuhkan agar suatu kebijakan atau program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan agar tujuan kebijakan atau program pun dapat tercapai. Berikut wawancara bersama Ibu Dr. Ulfa Tenri Batari selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar.

"komitmen kepala bidang Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan dengan adanya aturan peraturan Pemerintah tentang sistem

pembelajaran online (dalam Jaringan)''. (Hasil wawanacara UTB 23 maret 2022)

Berdasarkan hasil tersebut Kepala Bidang dan Satuan Pendidikan sudah komiten tentang pembelajaran sistem dalam jaringan sesuai dengan surat edaran.

4. Struktur Birokrasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mempunyai kedudukan strategis dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Gowa secara dini dengan harapan agar mereka memiliki kemampuan dan keahlian (profesionalisme) yang diperlukan dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur birokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Birokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memiliki seperangkat aturan yang memola jalannya kegiatan kerja. Segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal formal. Setiap tindakan personil di format oleh aturan organisasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai sebuah instansi pendidikan yang telah mengadopsi nilai-nilai birokrasi dan salah satu ciri yang diadopsi yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja pada organisasi di format ke dalam satuan unit kerja. Setiap satuan kerja/elemen dalam struktur memiliki tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing. Adanya

pemetaan tugas pokok dan fungsi merupakan cerminan dari diadopsinya sistem pembagian kerja. Sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala bidang Sekolah dasar Dr. Ulfa Tenri Batari mengatakan bahwa:

"iya saya sebagai kepala bidang Sekolah Dasar bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan teknis, pelaksanaan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Sekolah Dasar". (Hasil wawancara UTB 23 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diketahui bahwa kepala bidang sekolah dasar Kabupaten Gowa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah dasar di semua sekolah yang ada di Kabupaten Gowa di tingkat Sekolah Dasar

Bahwa dalam rangka implementasi penyerdahan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa struktur organisasi Dinas Pendidikan yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Gowa Nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan sudah tidak sesuai dengan lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggara pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

Hasil observasi penelitian dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya masing-masing memiliki sejumlah personil yang diatur dalam penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur

organisasi, dan setiap jenjang melekat peran atau wewenang yang harus dijalankan sesuai tugas yang diberikan atau dilimpahkan.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Kebijakan sistem pembelajaran pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong pengimplementasian Kebijakan sistem pendidikan. Sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses pengimplementasian Kebijakan sistem pendidikan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendukung dan mendorong Implementasi Kebijakan Sistem Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa, maka peneliti melakukan wawancara dengan satuan pendidikan Kabupaten Gowa mengatakan bahwa :

"salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 ialah dengan adanya Surat edaran pemerintah dalam melaksanakan sistem pembelajaran dalam jaringan". (Hasil wawancara RM. 24 Maret 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa salah satu faktor yang mendukung implementasi kebijakan dalam menggunakan teknologi sebagai bahan untuk dalam jaringan adalah dengan adanya dasar hukum pelaksanaannya yang tertuang dalam Surat edaran pemerintah dalam

melaksanakan sistem pembelajaran dalam jaringan. Selanjutnya wawancara yang disampaikan oleh kepala bidang Sekolah dasar Dr. Ulfa Tenri Batari mengatakan bahwa:

Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan dalam pembelajaran daring adalah sarana prasarana yang memadai, kesiapan kepala bidang Sekolah Dasar dalam merencanakan proses pembelajaran daring, adanya kemahiran guru dalam penggunaan teknologi serta terjalinnya komunikasi antara guru dan orang tua

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 merupakan adanya dukungan dari sumber daya manusia yang memadai seperti guru atau tenaga didik sebagai objek yang melaksanakan kebijakan sistem pembelajaran dalam jaringan. Selanjutnya wawancara yang disampaikan oleh salah satu orang tua peserta didik di tingkat Sekolah Dasar:

"Kelebihan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan tersedianya fasilitas e- moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu seperti yang di ungkapkan oleh kepala bidang Sekolah Dasar pada saat saya mengikuti binbingan teknologi". (Hasil wawancara 29 Maret 2022)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem pembelajaran dalam jaringan sangat mendukung dengan adanya alat berkomunikasi antara peserta didik dan tenaga didik.

1. Faktor penghambat

Pada penelitian ini faktor penghambat dapat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan di proses implementasi kebijakan

sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten. Untuk mengetahui faktor penghambat tersebut maka dilakukan wawancara kepada satuan pendidikan.

"kurangnya Kemampuan guru dalam menggunakan teknologi pada saat sistem pembelajaran dalam jaringan". (Hasil wawancara RM 23 Maret 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan, informasi pengetahuan tentang ilmu teknologi sangat penting bagi kehidupan kita sekarang, apalagi kita selaku guru harus dituntut dan siap dengan bermacam keadaan dan situasi. Pada masa pandemi covid-19 ini banyak guru yang masih belum memiliki pengetahuan tentang teknologi, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu orang tua peserta didik di tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Gowa mengemukakan bahwa :

"Hambatan atau kendala dalam mengontrol anaknya ialah karena anak sendiri mempunyai handphone juga dan terkadang dia mengerjakan tugas itu di rumah temannya jadi saya tidak tau bagaimana dia mengerjakan tugas di sekolahnya kalau dia tidak di rumah". (Hasil wawancara 29 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa selaku orang tua siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Gowa diketahui bahwa faktor penghambat atau kendala mengontrol siswa dalam penggunaan teknologi ialah ketika anaknya tidak mengerjakan tugasnya di rumah melainkan di rumah temannya. Sama halnya dikatakan oleh salah satu peserta didik di tingkat Sekolah Dasar:

"Kurang minat dan motivasi belajar peserta didik". (Hasil wawancara 28 Maret 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam pembelajaran secara dalam jaringan peserta didik yang sudai kelihatan kurang minat dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran secara dalam jaringan meskipun siswa sudah diberikan fasilitas oleh orangtua masing-masing. Peran orang tua peserta didik dalam mengawasi anak-anak perlu diperhatikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama di lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa, sudah terlaksana sesuai dengan surat edaran Nomor 443-5847 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Sejak kasus covid 19 mulai meningkat, sistem pendidikan tidak lagi melakukan aktivitas seperti biasa, karena pemerintah memberlakukan sistem di rumah saja, salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah menggunakan teknologi jaringan dan informasi bagi system pembelajaran terutama di sekolah, dalam perosesnya banyak sekali kendala-kendala yang di hadapi oleh guru yang di mana pembelajaran daring ini baru pertama kali dilakukan seperti terkendala dengan sinyal dan lain-lain, akan tetapi kendala tersebut bukan menjadi penghalang untuk mendidik peserta didik, seiring berjalannya waktu pemerintah mengizinkan pihak sekolah untuk membuka kembali pembelajaran di sekolah maka terciptalah pembelajaran daring. Setiap pembejalan terkadang adanya kelebihan dan kekurangan termasuk pembelajaran daring dan luring di masa pandemi covid 19 ini, akan tetapi dari sistem pembelajaran daring dan luring diharapkan guru untuk kreatif dalam mendidik peserta didik Supaya keberhasilan pembelajaran bisa tercapai dengan baik atau efektif.

Proses sistem pendididkan pada masa pandemi covid 19 diukur menggunakan indikator oleh (Edward III george C, 1984). Antara lain:

- 1) Komunikasi kebijakan sangat perlu untuk disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi suatu program masyarakat agar *implementor* dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan satuan Pendidikan Kabupaten Gowa mengetahui apa saja yang harus dilakukan, di mana hal tersebut menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada target grup (kelompok sasaran) sehingga ada kejelasan mengenai kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Gowa.
- 2) Sumber Daya ini berkenaan dengan kesediaan dari sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dimensi sumber daya menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan suatu program, karena sumber daya adalah penggerak utama dalam suatu program. Apabila sumber daya tidak mencukupi maka pelaksanaannya akan terhambat dan tidak bisa berjalan dengan harapan yang diinginkan;
- 3) Disposisi Implementor dalam pelaksanaan kebijakan sistem pendidikan sudah sangat baik dapat dilihat dari bagaimana komitmen dan sikap para implementor terhadap suatu program atau kebijakan. sikap para pelaksana dalam menyikapi pandemi covid 19 sudah sangat profesional dan

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait sistem pembelajaran daring maupun luring;

- 4) Struktur Birokrasi Dinas Pendidikan dalam menyikapi pandemi covid 19 sudah cukup baik dilihat dari pembagian kerja dimana membagi dua sistem pembelajaran yaitu daring dan luring.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat digunakan:

1. Sosialisasi dilakukan dengan cara melibatkan elemen masyarakat dan dilakukan secara merata agar penyampaian informasi dapat sesuai dengan yang diinginkan;
2. Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pada sistem pembelajaran daring dan luring dengan lebih meningkatkan pemahaman, lalu membuat sebuah pelayanan untuk menangani permasalahan pandemi covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Budiyanti, N., Supiana, S., & Zakiah, Q. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Pembelajaran Daring di Pesantren Persatuan Islam 1-2 Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 45–60.
- Edward III george C. (1984). *Public policy Implementing*. Jai Press Inc.
- Fatimah, A. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Masa Pandemi Virus Corona Disease (Covid-19) di Kota Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(3).
- Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo: Communication and Humanities*, 1(3), 126–136.
- Jojo, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5150–5161.
- Priyatin, N. N., & Rahmi, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 86–96.
- Pujilestari, Y. (2020). Dampak positif pembelajaran online dalam sistem pendidikan Indonesia pasca pandemi covid-19. *Adalah*, 4(1), 49–56.

- Surbakti, F. P., Marzuki, M., & Mukidi, M. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA BINJAI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA BINJAI (Studi Perspektif Tentang Peraturan Walikota Dalam Pemberian Bantuan Sosial). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1023–1046.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicho*, 3(2), 267–278.
- Arinda, P. R. (2014). Efektivitas Penerapan B-DISO (Banyuwangi Digital Society) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Islamy, M. irfan. (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suaib, Muhammad Ridha. (2016). Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Candi Gebang.
- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Humaizi, Aziz Abdul. (2003). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3, No 1. (<http://ojs.ums.ac.id>, diakses pada 14 Januari 2020).
- Benigni, G. (2004). Una metodología orientada a objetos para la producción de software multimedia. *Saber*.
- Deni, D. (2012). *inovasi pendidikan pendekatan praktik teknologi multimedia dan pembelajaran online*. pt. remaja rosdakarya.

Gelinas, U. & D. (2012). *Accounting Information Systems, 9th ed.* South western.

Kadir, A. (2014). . *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi.* : Andi.

Nyoman, S. (2014). *pendidikan dan konsultasi gigi* (Widiarti D). buku kedokteran EGC.

Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*.

Romney, Marshall B., dan P. J. S. (2015). *No , 13th ed. Accounting Information Systems*. Pearson Educational Limited.

Sholikhin, A., & Riasti, B. K. (2013). Pembangunan Sistem Informasi Inventarisasi Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Berbasis Web. *IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security*, 2(2).

Viridi, S. (2006). Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Buku Materi IT Literacy*, December 2012, 1–116. <https://files.indihomestudy.com/pdf/ac6c9913-953a-4c0a-9426-800cffed8ece.pdf>

Winarno, B. (2002). *Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

LAMPIRAN

Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Buloh Aneke Nk. 259 Telp. 0411 460548 M-fax 0411 460548 E-mail: dp@umh.ac.id



Nomor : 471/05/C.4-VIII/II/43/2022

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Rajab 1443 H

22 February 2022 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0146/FSPPA.1-VII/II/43/2022 tanggal 22 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. JUFRI

No. Stambuk : 10564 1118916

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Kehidupan Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Februari 2022 s/d 25 April 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katira.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setua LP3M,

Dr. Abubakar Idhan, MP.

IPM 101 7715



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27344/B.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMU Makassar Nomor : 471/05/C.4-VII/04S/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH JUFRU
Nomor Pokok : 105641118516
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. A. Yani No. 249, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah tersebut secara langsung dalam rangka pelaksanaan Skripsi, dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI BABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Februari s.d 28 April 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang bersangkutan yang telah bersedia memberikan surat izin penelitian.

Dokumen ini diundangkan secara elektronik dan Surat ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dengan menggunakan Barcode.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat dan akan dipergunakan sebagai surat resmi.

Dibuat di Makassar
Pada tanggal : 25 Februari 2022

AN. GOBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

I. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19820624 200303 1 003

Terdapat Yth
1. Ketua LP3M UNISMU Makassar
2. Kepala Dinas

Wakil PTSP 2022 2022

Jl. Boulevard No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 442035
Website : www.dinasptsp.go.id Email : info@ptsp.go.id
Makassar 90231

Nomor : 2731/US.01/PTSP/2022
Halaman : 2 (3)

Lampiran Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :



Nomor : 27344/S.01/PTSP/2022
Halaman : 3 (3)

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelibangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Ahmad Asyraf, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp (0411) 865972, 551593, Fax (0411) 865573



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Jufri
NIM : 105641118916
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	40 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Ditentukan surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperangkatnya.

Makassar, 14 Juli 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nuraini, S.Hum, M.I.P.
NBM 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411) 865972, 551 593, Fax (0411) 865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
Email: library@unismuh.ac.id

BAB I Muh Lufri 105641118916

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jul-2022 10:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 1370310284

File name: turnirin bab_1.docx (15.83K)

Word count: 689

Character count: 4605

BAB I Muh Iufri 105641118916

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.uns.ac.id
Internet Source

2%

2

Submitted to Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Student Paper

2%

3

jurnal.universitaspahlawan.ac.id
Internet Source

2%

4

Submitted to Sriwijaya University
Student Paper

2%

5

bocarevolusi.blogspot.com
Internet Source

2%

Exclude pages

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Muh Jufri 105641118916
by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jul-2022 10:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 3870311008

File name: turnirin_bab_2.docx (38.53K)

Word count: 3718

Character count: 25767

BAB II Mah Jufri 105641118916

21%
SIMILARITY INDEX

LULUS

PRIMARY SOURCES

19%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

1	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia (Student Paper)	5%
2	gudangilmu78.blogspot.com (Internet Source)	3%
3	jurnal.institutpendidikan.ac.id (Internet Source)	2%
4	Submitted to Universitas Negeri Jakarta (Student Paper)	2%
5	ibnusufile.blogspot.com (Internet Source)	2%
6	ariss.hudbadani.blogspot.com (Internet Source)	2%
7	123dok.com (Internet Source)	2%
8	maseptiandrianiskandar.blogspot.com (Internet Source)	2%
9	kurnia@nggarut.blogspot.com (Internet Source)	2%



Exclude quotes 100
Exclude bibliography 100

Exclude matches



BAB III Muh. Lufri 105641118916

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jul-2022 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1870311368

File name: turnin_bab_3..docx (16.52K)

Word count: 640

Character count: 4112

BAB III Muh Jufri 105641118916



6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS



Uray Gita Isfisiwari, Warneri Warneri, Okianna

Okianna, "FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI MINAT NASABAH MASUK

ASURANSI PENDIDIKAN PADA AIR

ITAS MOHAMMAD

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

AKA

3%

 Internal Equity

jurnal.untan.ac.id

www.coursehero.com



3%

2%

2%

Exclude: none

Exclude 90,000,000

Environ Monit Assess (2008) 142:111–124

BAB IV Muh Jufr: 105641118916

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jul-2022 10:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 1670311693

File name: turnirin bab_4.docx (27.54K)

Word count: 3244

Character count: 21303

BAB IV Muh Jufri 105641118916



6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS



123dok.com

2%

jurnal.untan.ac.id

Internal Sources

2%



diknastenggalek.com

Internet Culture

2%



BAB V Muh Jufri 105641118916

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jul-2022 10:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 1370311944

File name: turning_bab_5.docx (18.38K)

Word count: 344

Character count: 2231

BAB V Muhiyulri 105641118916

ORIGINAL REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

LULUS

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



123dok.com

Internet Sources

3%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



penulis Skripsi ini bernama MUH. JUFRI merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara yang lahir di dusun Jampang, Desa Tambangan Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak dari pasangan Amiruddin J dan Jumba pekerjaan orangtua sebagai petani dan Ibu Rumah Tangga.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2010 lulus dari SD N 338 Jampang desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Kemudian melanjutkan di SMP NEGERI 20 Bulukumba dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016 lulus SMA negeri 5 Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2016 dan mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik